

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO.01 PADA KANTOR CAMAT TANGGETADA

Muh Afdal Risal¹; Sabarudin²; Suriyanto Ilham³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jln. Pemuda No. 399 Kolaka Sulawesi Tenggara
E-mail : afdal200302@gmail.com (Koresponding)

Abstract: The purpose of this study is to determine the implementation of PSAP 01 concerning the Presentation of Government Financial Statements in the Tanggetada Sub-district Government. This study examines the problem using a qualitative method. Sugiyono, (2013) stated that this study has a post-optimism basis which means that the key instrument in the study is the researcher himself with data collection techniques using triangulation techniques and has results that emphasize more on meaning. This study focuses on the balance of elements presented in the financial statements of the Tanggetada Sub-district Government with PSAP No. 01. The Tanggetada District Government has prepared a financial report as a form of accountability for regional financial management, in this case the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Kolaka Regency which includes the Tanggetada District Government in a timely manner. This Financial Report provides relevant information regarding the financial position and performance achievements of the Tanggetada District Government

Keywords: *Presentation Analysis, Financial Reports, PSAP 01*

Pemerintah memiliki sasaran pokok yaitu, menyediakan layanan dan fasilitas kepada publik serta memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjalankan sistem pemerintahan yang efektif dan akuntabel, institusi Pemerintah membutuhkan sejumlah pihak pendukung untuk memberikan dukungan dalam menjalankan Tanggung jawab ini merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pemerintah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai landasan analisis serta untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan keuangan.

Dalam rangka menciptakan manajemen keuangan negara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, aparatur negara Indonesia akan berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pengembangan Standar (SAP), yang berfungsi sebagai panduan utama dalam perancangan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Setiap negara menentukan standar akuntansi yang di jadikan acuan dalam pembuatan pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan berdasarkan pasal 5 ayat 2 UUD 1945 uu No 17 tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara, dan uu No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Di Indonesia, penerapan SAP diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Dengan demikian PSAP diharapkan Ineraca keuangan pemerintah dapat disusun secara konsisten, transparan, dan akuntabel, agar bisa meningkatkan dalam manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan negara. Peraturan ini mengharuskan setiap instansi pemerintah, termasuk kantor camat, untuk menyusun Dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, neraca keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat, serta dapat dengan mudah di mengerti oleh pengguna laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Setiap laporan keuangan pemerintah wajib dibuat dan di peresentasikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), salah satunya adalah PSAP No. 1 yang mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAP No. 1 menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat disusun untuk memenuhi dan menjawab kepentingan umum dari mayoritas pengguna pelaporan yang bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan membandingkan manajemen keuangan, baik antara rencana pendanaan dan realisasi, antara periode, maupun antarentitas.

Laporan keuangan yang ditujukan bagi kepentingan umum di susun menggunakan pendekatan akrual, dan mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Tujuan utama dari standar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan, termasuk masyarakat, badan legislatif, auditor, donor, investor, kreditor, serta instansi pemerintah yang terlibat, dengan tujuan meningkatkan tanggung jawab publik, dan transparansi pengelolaan keuangan negara daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan tujuan dari pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) ialah Menetapkan pedoman laporan keuangan yang di susun bagi kepentingan umum guna meningkatkan kemampuan membandingkan neraca keuangan, baik antara anggaran dan realisasi, antarperiode, maupun antarentitas.

METODE

Metode ini menerapkan pendekatan kualitatif guna menganalisis permasalahan yang ada. Menurut Sugiyono (2013) pendekatan penelitian kualitatif ini berlandaskan pada pandangan filsafat postpositivisme, yang menekankan bahwa peneliti adalah instrumen utama dalam

penelitian. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan melalui teknik triangulasi, yaitu penggabungan berbagai metode pencatatan data, serta analisa data yang bersifat induktif. hasil dari penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman arti dari generalisasi. Kecamatan Tanggetada dengan PSAP No. 01.

HASIL

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) mengenai Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan bahwa tujuan utama dari laporan ini adalah untuk menyajikan informasi, realisasi dari pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus, atau defisit serta pembiayaan pada setiap entitas pelaporan yang secara terpisah anggaran yang telah ditetapkan.

Laporan operasional merupakan dokumen yang menyajikan ringkasan mengenai aset ekonomi yang meningkatkan nilai ekuitas pemanfaatannya diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah selama masa pelaporan tertentu. unsur-unsur utama yang tercakup dalam laporan ini meliputi pendapatan-LO, biaya transfer serta pos pos luar biasa

Informasi arus kas berfungsi sebagai indikator proyeksi arus kas di masa depan dan sebagai alat untuk menilai akurasi estimasi laporan arus kas menyajikan data terkait aliran masuk dan keluar kas yang terjadi dalam suatu periode tertentu telah direncanakan sebelumnya, mencakup aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan ini mencakup saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode pelaporan tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas, yang juga dikenal sebagai laporan perubahan modal, adalah bagian integral dari laporan keuangan dalam siklus akuntansi. mengungkapkan perubahan ekuitas yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu misalnya bulanan atau tahunan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui penggunaan modal oleh pemerintah pusat

atau daerah laporan ini memberikan gambaran tentang perubahan ekuitas baik peningkatan maupun penurunan akibat berbagai faktor, termasuk surplus atau defisit operasional, penyesuaian kebijakan akuntansi serta perbaikan atas kekeliruan signifikan. Dengan demikian, laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ekuitas pemerintah berubah seiring waktu, mencerminkan hasil dari aktivitas operasional dan kebijakan yang diambil selama periode pelaporan.

Pemerintahan Kecamatan Tanggetada Pemerintah Kabupaten Kolaka telah menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada 28 Maret 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mewajibkan pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan unaudited selambat lambatnya tiga bulan setelah penutupan tahun anggaran. yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Tanggetada laporan keuangan di susun tepat waktu dan memuat informasi yang sesuai mengenai kondisi keuangan serta capaian kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Kecamatan Tanggetada. Berdasarkan laporan RAB yang ada di atas pada tahun 2023 hanya ada dua kegiatan yang berhasil terealisasi yaitu pembangunan deucker dan lanjutan pembangunan balai desa, ada beberapa pembangunan yang lambat pada tahap pelaksanaannya di karnakan proses pencairan dana desa yang di lakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu dalam tahap pelaksanaan atau penyelesaian pembangunan tersebut.

Penyajian laporan keuangan ini adalah salah satu langkah Pemerintah Kecamatan Tanggetada untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan penyusunan laporan keuangan yang disusun secara tepat waktu dan sesuai SAP. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat memenuhi

tuntutan dalam tugas pemerintah pelaksanaan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

PEMBAHASAN

Pemerintah kecamatan Tanggetada Pemerintah Kabupaten Kolaka sudah Menyusun laporan keuangan sesuai prinsip perinsip akuntansi Pemerintahan (SAP). pada dasarnya pembuatan laporan keuangan di lakukan sesuai dengan tahapan siklus akuntansi, dimulai pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Penelitian hanya mencakup tahapan pembuatan laporan keuangan yang selaras dengan SAP Pemerintah Kecamatan Tanggetada dalam penyusunan laporan keuangan

Bagian Keuangan dan Perlengkapan Pemerintah Kecamatan Tanggetada Dalam pencatatan transaksi keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan aplikasi seperti SIPD, EMONER, dan RUPSIRUP untuk melakukan penjurnalan dan proses pemindahan catatan transaksi dari jurnal kebuku besar. aplikasi ini merupakan implementasi nyata dari Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan beberapa sumber informan yang menyatakan bahwa Laporan pemerintahan kecamatan Tanggetada sudah sesuai dengan standar laporan keuangan yaitu PSAP No.01. Unsur maupun pos-pos yang di masukkan dalam laporan itu sudah mereka lakukan pelatihan tiap tahunnya, Jika saja ada yang belum di masukkan maka itu tentunya melalui pertimbangan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipastikan bahwa pelaporan keuangan dalam pemerintahan kecamatan Tanggetada sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam PSAP No.01.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kecamatan Tanggetada, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Tanggetada Pemerintah Kabupaten Kolaka sudah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan yang mematuhi standar akuntansi Pemerintahan (SAP). Tahapan penyusunan laporan keuangan ini mengikuti tahapan siklus akuntansi yang sistematis untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. dilakukan melalui tahapan-tahapan akuntansi yang sistematis, mulai dari analisis transaksi, penjurnalan, hingga penyusunan laporan keuangan, dengan menggunakan aplikasi seperti SIPD, EMONER, dan RUPSIRUP.
2. Dari tujuh jenis laporan keuangan yang ditetapkan dalam SAP, hanya lima jenis laporan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Tanggetada, yaitu:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (Lra),
 - 2) Laporan Operasional (Lo),
 - 3) Neraca,
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (Lpe),
Dan
 - 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk).Sementara satu laporan lainnya, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), belum disusun.
3. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta berfungsi sebagai acuan dalam menentukan keputusan. Namun, belum lengkapnya jenis laporan yang disusun menyebabkan informasi yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang menyeluruh.
4. Upaya penyusunan laporan keuangan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kecamatan Tanggetada sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek kelengkapan laporan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan yang Lengkap
Pemerintah Kecamatan Tanggetada diharapkan dapat menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan ketentuan SAP, khususnya Laporan Perubahan SAL yang hingga saat ini belum disusun. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan informasi keuangan yang disampaikan.
2. Peningkatan Kompetensi SDM Perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada staf bagian keuangan dalam hal penyusunan seluruh jenis laporan keuangan, agar mampu memahami dan mengimplementasikan SAP secara menyeluruh.
3. Pemanfaatan Sistem Informasi secara Optimal
Penggunaan aplikasi seperti SIPD, EMONER, dan RUPSIRUP harus dimaksimalkan tidak hanya dalam pencatatan, tetapi juga dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan secara menyeluruh, tepat waktu, dan akurat.
4. Pengawasan dan Evaluasi Berkala.
Diperlukan adanya audit internal dan evaluasi berkala terhadap penyusunan laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul dan Hamir, (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, (2010). Akuntansi Sektor Publik. Erlangga
- Burhan Bungin, (2010). Informan Penelitian
- Faradillah, (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam

- Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010). Universitas Hasanuddin. Mak.asar.
- Halim, (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat. Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Harahap, (2008). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendri, (2020) Penerapan PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Banteng. Accounting Journal 78-85.
- Kema, (2013). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Kieso et. Al, (2008). Akuntansi Intermedit edisi kedua belas jilid 1. Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Kusuma, (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember). Universitas Jember.
- Moleong, (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Purwosetiono, (2018). Ekologi Pemerintahan, Jakarta, PT. Pertja.
- Rachmat. (2010). Akuntansi Pemerintah. CV Pustaka Setia
- Ranti Sri Wulandari, (2019). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan PADA KANTOR CAMAT KUANTAN TENGAH
- Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Tanjung, (2012). Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI. Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Tanjung, (2012) dalam Vicky Agustianawana(2013). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo
- Weygant, (2018). Intermediate Accounting IFRS Edition 3rd Edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc